

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.; Tim Redaksi Pustaka Setia, ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56–66.
- Kurniawan, R. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia Jurnal of Lawaw*, 10(3), 569–586.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (17th ed.; T. Surjaman, ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Kesatu). Bandung: Alfabeta.
- Pravijanti, V. (2018). Analisis Keberhasilan Inovasi Pelayanan Paket Hemat 1 (Penerbitan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 6(4).
- Pujileksono, S. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Kedua). Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Ramadhanny, B. M. (2016). Pelayanan Prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik. *Publika*, 4(8), 1–9.
- Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan

- Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 962–971.
- Sinambela, et all. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Keenam). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (22nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 27). Bandung: Alfabeta.
- Thalib, U. (2009). *Kajian Pembangunan Berbasis Komunitas (Studi Kasus di Daerah Maluku)*. 1–19. <https://doi.org/10.2174/138920312803582960>
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan “Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”* (1st ed.; F. Hutari, ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyono, S., Prihatminingtyas, B., & Purwatiningsih, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 1–20.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi  
Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  
Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi  
Pelayanan Publik

Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar  
Pelayanan

<http://cakrawalanews.co/2017/03/24/urus-akta-kelahiran-dan-kk-bisa-jadi-satu/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3485786/ribuan-warga-surabaya-bisa-manfaatkan-layanan-pahe>